

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI PADA TATA KELOLA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA

Arfin D^{1*}, Jaelan Usman² Sudarmi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the farmer card program on the governance of subsidized fertilizer distribution in Tinggimoncong District, Gowa Regency. This type of research is descriptive qualitative with data collection using observation, interview, and documentation techniques. Determination of informants using purposive sampling technique. The data validity technique used was source triangulation. The results showed that the amount of output that could be issued was effective because the e-RDCK system and based on the land area should not be more than 2 ha owned by farmers who run their farming businesses. The level of satisfaction obtained by most of the farmer card users is quite agree and satisfied with the existence of the farmer card program from the government. Creative products in this case are farmer cards and EDC machines in the distribution of subsidized fertilizers. The intensity that will be achieved during this farmer card process is related to the time of purchasing fertilizers that still use the old habits so that there is a buildup of buyers and causes delays in delivery, so far this goal still needs to be improved to achieve the goals of the farmer card program.

Keywords: *effectiveness, farmer card, subsidized fertilizer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah hasil yang dapat dikeluarkan sudah efektif karena sistem e-RDCK dan berdasarkan kepada luas lahan tidak boleh lebih 2 ha yang dimiliki petani yang mengusahakan usaha taninya. Tingkat kepuasan yang diperoleh sebagian besar pengguna kartu tani sudah cukup setuju dan puas dengan adanya program kartu tani dari pemerintah. Produk kreatif dalam hal ini kartu tani dan mesin EDC dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Intensitas yang akan dicapai selama proses kartu tani ini berlangsung adalah berkaitan dengan waktu pembelian pupuk yang masih menggunakan kebiasaan lama sehingga terjadi penumpukan pembeli dan menyebabkan keterlambatan pengiriman, sejauh ini tujuan tersebut masih perlu untuk diperbaiki untuk tercapainya tujuan program kartu tani.

Kata kunci: efektivitas, kartu tani, pupuk bersubsidi

* arfin@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, dimana Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1980, selain itu juga sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang sangat baik yakni seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia pada saat itu. Sampai dengan saat ini sektor pertanian memiliki andil yang sangat tinggi terhadap penghasilan nasional Negara (Rahman, 2018).

Pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi serta aktivitasnya pada pelaksanaan pada program pemerintahan tentu memerlukan semua pihak untuk terlibat dalam masyarakat, aparat pemerintah sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan (Hutagalung & Hermawan, 2018).

Menurut pendapat Markus Zahnd (Megawati, 2015) mendefinisikan efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan Mahmudi, (2005) mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas tata kelola pemerintahan saat ini menjadi sebuah tuntutan pada pemerintah terhadap pengelolaan baik itu organisasi publik maupun sarana prasarana publik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam setiap organisasi, sehingga akan menimbulkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang sudah ditentukan (Siswanto, 2006).

Saat ini pembangunan sektor pertanian dilakukan secara modern dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan berkelanjutan, yang mana pada sektor pertanian ini didominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan

kualitas serta kuantitas pada hasil pertanian (Fikrیمان, 2017).

Pupuk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Dalam pendistribusian pupuk seringkali terjadi harga pupuk yang tidak stabil, sehingga pemerintah memberi subsidi berupa pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi sangat diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah dalam pendistribusian di setiap daerah. Pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi seperti urea, SP 36, ZA, NPK dan Organik. Pada kenyataannya, sering ditemui berbagai masalah seperti kelangkaan pupuk bersubsidi (Suryana, Agustian & Yofa, 2016).

Kelangkaan pupuk sudah menjadi realitas yang sering kali ditemui pada setiap daerah pertanian khususnya di Kabupaten Gowa. Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan kebijakan dan peraturan pemerintah pusat, memberikan kemudahan bagi masyarakat tani kurang mampu dalam menyalurkan bantuan Pupuk bersubsidi agar tepat sasaran bagi petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi. Serta memberikan kemudahan akses petani dalam menebus pupuk bersubsidi.

Sejatinya, pemerintah telah mengupayakan berbagai program demi kesejahteraan petani Indonesia. Dengan alasan, bahwa sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan peran penting di bidang ekonomi pembangunan. Tujuan umum dari berbagai kebijakan yakni, petani Indonesia diharapkan memiliki kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia, dengan begitu hasil produktivitas akan mengalami peningkatan (Darwis, 2014).

Kartu Tani adalah kartu debit BNI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BNI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya (Mufidah & Prabawati, 2018). Kartu ini bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Kartu tersebut dikeluarkan perbankan untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* (EDC) di pengecer resmi.

Implementasi Kartu Tani sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani sesuai Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penggunaan Kartu Tani pun ditegaskan di dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Untuk mengetahui efektivitas tata kelola kartu tani ini peneliti menggunakan pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Danim, (2004) menyebutkan ukuran efektivitas yakni sebagai berikut: (1) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, (2) tingkat kepuasan yang diperoleh (3) produk kreatif dan (4) Intensitas yang dicapai.

Sehubungan dengan permasalahan yang sangat luas yang mudah dijumpai pada pengelolaan kartu tani yakni terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani tidak mampu, serta pemberian kartu tani yang tidak tepat sasaran menjadi polemik tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pemerataan pelayanan terhadap para petani yang ada di Kabupaten Gowa. Dengan demikian dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis ingin melakuka

penelitian untuk mengetahui efektivitas program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi di pandu oleh kata-kata yang ditemukan pada saat di lapangan. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka perlu dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti khususnya pada objek dan subjek penelitian, Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat menyampaikan sejumlah pertanyaan ke pihak informan secara lisan dengan

menggunakan panduan wawancara tiada lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis, Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan yang berkenaan dengan judul penulis dan data dari informan atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti peneliti. Metode ini digunakan salah satu pelengkap dalam memperoleh data, tiada lain untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Hasil yang Dapat Dikeluarkan

Upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan, petani yang telah bergabung ke dalam kelompok tani dapat mengajukan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan kebutuhan petani dalam mengembangkan usaha taninya. Pada

daerah penelitian yaitu Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan kepada petani sudah memiliki ketentuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa. Sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah mengajukan RDKK yakni berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan komoditi unggulan, oleh sebab itu petani yang mengajukan pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan.

Pada daerah Tinggimoncong jumlah pupuk subsidi yang diberikan pemerintah bahkan sangat terbatas dan tidak semua sesuai dengan pengajuan RDKK. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk subsidi merasa tidak cukup dengan kebutuhan petani yang lain yang tidak mendapatkan pupuk, menunggu atau membeli pupuk ke kios lain bahkan ke luar daerah.

Tabel 1.
Kebutuhan Pupuk Kec. Tinggimocong Tahun 2022

No	Pupuk	Jumlah
1	Urea	952.000
2	ZA	228.000
3	SP36	342.000
4	NPK	269.000
5	Organik	70.000

Sumber: PPL Kec. Tinggimocong, 2022

Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan jumlah pupuk yang diberikan disesuaikan berdasarkan kuota yang diberikan untuk Kabupaten Gowa. Jumlah kuota ini kemudian didistribusikan di tingkat kelompok tani kepada petani yang terdaftar dalam e-RDKK dan menggunakan kartu tani yang tertera data tentang luas lahan petani. Kartu tani ini hanya bisa ditukarkan dengan pupuk yang dibutuhkan.

penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara menyesuaikan antara pupuk yang dibutuhkan oleh para petani dengan jumlah pupuk yang akan di pesan oleh distributor sehingga terjadi kesesuaian antara jumlah pupuk yang di pesan oleh distributor dengan jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh para petani.

Kelompok tani telah menerima program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani sesuai dengan jumlah pupuk yang diminta berdasarkan rincian yang tertera dalam RDKK sesuai dengan jumlah petani yang memiliki kartu tani subsidi. Penyaluran subsidi pupuk dilakukan oleh kelompok tani dengan memberikan kepada petani yang menjadi anggotanya sesuai dengan jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai luas lahannya.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani tepat jumlah pupuk sudah efektif karena Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sistem pengajuan RDKK yang diberlakukan kepada petani sudah memiliki ketentuan dari Dinas Pertanian. Sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah terdaftar dalam e-RDKK yakni petani yang tergabung dalam kelompok tani dan berdasarkan kepada luas lahan tidak boleh lebih 2 ha yang dimiliki petani yang mengusahakan usaha taninya, oleh sebab itu petani penerima kartu tani penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan yang telah ditentukan.

Tingkat Kepuasan yang Diperoleh

Tingkat kepuasan terhadap program merupakan salah satu aspek yang perlu untuk dikaji. Aspek ini dapat menganalisis sejauh mana kepuasan dari penerima kartu tani, sehingga dapat diketahui pula sejauh mana tingkat efektivitas dari program kartu tani yang dijalankan oleh pemerintah khususnya di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Kabupaten Gowa. Tingkat kepuasan ini menjadi tolok ukur dari penerima program kartu tani dan juga

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap program kartu tani ini, sebagian besar masyarakat petani khususnya pengguna kartu tani sudah cukup setuju dan puas dengan adanya program kartu tani dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya kartu tani masyarakat lebih mudah dalam akses pupuk dan juga transaksi pupuk bersubsidi menjadi terkendali, serta mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hanya saja memang perlu adanya perbaikan dari program kartu tani supaya dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan observasi penelitian dalam tingkat kepuasan yang diperoleh pada pelaksanaan kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan Tinggimoncong, masih terdapat petani yang belum mengetahui secara detail pemanfaatan dan penggunaan kartu tani, hanya sebagian petani yang mengetahui pemanfaatan dan kartu tani. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian, sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal bimbingan masih jarang dilakukan sehingga belum efektif untuk mencapai agar seluruh masyarakat dan petani Kecamatan

Tinggimoncong mengetahui tentang kartu tani. Pemerintah yang lebih giat melakukan sosialisai akan dapat mengatasi permasalahan tersebut karena sosialisasi yang dilakukan dengan baik terhadap pihak-pihak pelaksana juga akan mendukung berjalannya kebijakan dengan efektif.

Produk Kreatif

Produk kreatif menjadi hal penting mengingat implementasi kebijakan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak akan berjalan apabila penunjang aktifitas tidak tersedia. Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa mengikat kerjasama dengan bank BNI, sehingga dalam hal ini pihak bank yang bertugas dalam menyediakan kartu tani dan mesin EDC sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Berikut ini adalah contoh kartu tani yang dimiliki oleh para petani sebagai identitas keanggotaan:



Gambar 1.
Kartu Tani

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2022

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi (simpanan), transaksi, penyaluran pinjaman), juga berfungsi sebagai kartu subsidi. Kartu tani diperlukan petani untuk membantu produksi pertaniannya. Kartu tani juga berfungsi sebagai identitas diri petani, sarana menabung serta salah satu syarat untuk mendapatkan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna pembiayaan pertanian. Bagi petani yang ingin membuat kartu tani syaratnya cukup sederhana, yakni fotokopi KTP, KK, data luas garapan maksimal 2 hektar dan sudah bergabung sebagai kelompok tani.

Kartu tani akan menjadi sarana bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk petani. Selain kartu tani dalam melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi dibutuhkan mesin

mesin EDC tersebut ada menu tersendiri yaitu terdapat menu program pemerintah yaitu: subsidi, cek kuota dan pinjaman. Masing-masing kios pengecer telah memiliki 1 (satu) buah mesin EDC. Berikut ini dokumentasi EDC yang terdapat di kios pengecer yang telah ditetapkan oleh dinas pertanian:



Gambar 2.
Mesin EDC (Electronic Data Capture)
Sumber: Dokumentasi penelitian, 2021

Mesin EDC atau Electronic Data Capture adalah sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan petani dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu tani (tanpa bayar tunai). Para petani yang ingin melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi dapat menggunakan kartu tani tersebut dengan cara menggesekkannya pada Mesin Electric Data Capture (EDC) oleh kios pengecer yang telah tersedia di tiap kios pengecer yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi terkait pengadaan mesin EDC sudah baik, namun seiring waktu kualitas ataupun performa mesin EDC sudah mulai menurun serta ada bagian yang perlu diperbaharui kembali. Dalam hal ini pihak kios tidak bertindak secara

cepat dan tegas melaporkan kendala tersebut kepada pihak BNI. Selain performa yang mulai menurun, konektivitas jaringan juga menjadi kendala bagi beberapa kios pengecer yang tinggal di perkampungan yang minim jaringan meskipun sudah disesuaikan dengan kartu mesin EDC yang bagus untuk dipakai di daerah tersebut seperti yang disampaikan oleh pihak bank BNI namun masih terdapat kendala dalam hal jaringan.

Intensitas yang Akan Dicapai

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Intensitas yang akan dicapai dalam kebijakan itu sendiri. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten

Gowa. Dinas bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan kartu tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa terdiri dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi bidang-bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Objek yang menjadi dasar pembentukan peraturan penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah semua petani yang terdaftar dan memang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi merupakan salah satu solusi yang tepat mengingat bahwa masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Keberhasilan implementasi kebijakan kartu tani adalah ditentukan oleh seberapa taat atau patuhnya para pelaksana kebijakan ataupun pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa dalam melaksanakannya.

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa memiliki jumlah kelompok tani sebanyak 30 kelompok tani, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan kartu tani selain

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Gowa banyak pihak yang terlibat. Mulai dari petani, kios pengecer dan Bank BNI di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa karakteristik yang dimiliki pihak-pihak pelaksana yang terlibat telah cukup mendukung dalam keberlangsungan kebijakan. Karakter mau bekerja sama antar kelompok tani, kios pengecer dan PPL untuk menghapus anggapan bahwa kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani sulit, rumit atau semacamnya menjadi hal yang wajib dimiliki oleh para pelaksana.

Diketahui bahwa pihak Dinas dalam hal ini PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) telah cukup mendukung dalam keberlangsungan kebijakan. Hal ini terlihat bila terdapat kendala-kendala dalam penerapan kartu tani seperti petani yang agak gaptেক, PPL yang akan membantu dan memberikan pemahaman-pemahaman terkait kartu tani sehingga implementasi kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik.

Pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan realisasi setelah sebuah program dilaksanakan.

program kartu tani sudah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut terlihat dari tujuan pendistribusian pupuk dengan asas 6 (enam) tepat hampir seluruh aspek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hanya saja masih ada yang belum terlaksana dengan baik atas kendala-kendala tertentu. Namun sejauh ini dapat dikatakan hampir seluruh tujuan yang ditetapkan dalam program kartu tani ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik.

Dari hasil yang didapat tersebut kendala selama proses kartu tani ini berlangsung adalah berkaitan dengan waktu pembelian pupuk yang masih menggunakan kebiasaan lama sehingga terjadi penumpukan pembeli dan menyebabkan keterlambatan pengiriman. Kartu tani memfasilitasi masyarakat petani untuk bisa menabung tanpa ada biaya administrasi, yang bertujuan masyarakat dapat menabung dan menggunakan uang tersebut untuk membeli pupuk sehingga tidak bersamaan setelah musim panen dengan harapan tidak ada penumpukan pembeli dan keterlambatan pengiriman. Sejalan ini tujuan tersebut masih perlu untuk diperbaiki untuk tercapainya tujuan program kartu tani.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kartu tani pada tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan jumlah hasil yang dapat dikeluarkan sudah efektif karena sistem yang diberlakukan kepada petani yang sudah terdaftar dalam e-RDCK yakni petani yang tergabung dalam kelompok tani dan berdasarkan kepada luas lahan tidak boleh lebih 2 ha yang dimiliki petani yang mengusahakan usaha taninya, oleh sebab itu petani penerima kartu tani penyaluran pupuk subsidi harus sesuai dengan luas lahan yang telah ditentukan. Tingkat kepuasan yang diperoleh sebagian besar masyarakat petani khususnya pengguna kartu tani sudah cukup setuju dan puas dengan adanya program kartu tani dari pemerintah. Produk kreatif dalam hal ini kartu tani dan mesin EDC dalam penyaluran pupuk bersubsidi menunjukkan bahwa sistem dalam EDC untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga penebusan pupuk bersubsidi menjadi tidak efisien. Intensitas yang akan dicapai selama proses kartu tani ini berlangsung adalah berkaitan dengan waktu pembelian pupuk yang masih menggunakan

kebiasaan lama sehingga terjadi penumpukan pembeli dan menyebabkan keterlambatan pengiriman, sejauh ini tujuan tersebut masih perlu untuk diperbaiki untuk tercapainya tujuan program kartu tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2004). *Motivasi kepemimpinan dan efektivitas kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwis, V. (2014). Subsidi Pupuk: kebijakan, pelaksanaan, dan optimalisasi pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45-60.
- Fikrman, F. (2017). Tranformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. *JAS (Jurnal Agri Sains)*, 1(2).
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Megawati, L. (2015). Analisis efektifitas sistem informasi akuntansi yang terotomatisasi pada penggajian karyawan secara efektif dan efisien dalam mendukung operasional perusahaan (Studi Kasus PT. Trikarya Abadi Sejahtera). *E-Journal Akuntansi "EQUITY,"* 1(2).
- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 6(9).
- Rahman, S. (2018). *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siswanto, H. . (2006). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryana, A., Agustian, A., & Yofa, R. D. (2016). Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk bagi Petani Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(1), 35-54.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi